BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dana perimbangan, belanja daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA), opini audit, ukuran pemerintah daerah, dan ukuran legislatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat selama periode 2019-2023. Hasil pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi data panel, yang dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dana perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi dana perimbangan, maka semakin rendah kinerja keuangan pemerintah daerah. Sebaliknya, semakin rendah dana perimbangan, maka akan semakin tinggi kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil signifikan menunjukkan bahwa hasil penelitian ini dapat digeneralisasikan ke dalam seluruh populasi.
2. Belanja daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi belanja daerah, maka kinerja keuangan pemerintah daerah akan semakin rendah. Sebaliknya, semakin rendah belanja daerah maka semakin tinggi kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil signifikan menunjukkan bahwa hasil penelitian ini dapat digeneralisasikan ke dalam seluruh populasi.
3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi SILPA dapat kinerja keuangan pemerintah daerah akan semakin rendah. Sebaliknya, semakin rendah SILPA maka semakin tinggi kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil signifikan menunjukkan bahwa hasil penelitian ini dapat digeneralisasikan ke dalam seluruh populasi.

4. Opini audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik opini audit yang diperoleh, maka semakin baik pula kinerja keuangan pemerintah daerah. Sebaliknya, semakin buruk opini audit, maka semakin rendah pula kinerja keuangan pemerintah. Hasil signifikan menunjukkan bahwa hasil penelitian ini dapat digeneralisasikan ke dalam seluruh populasi.
5. Ukuran pemerintah daerah yang diukur melalui total aset berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar ukuran pemerintah daerah, maka semakin baik kinerja keuangan pemerintah daerah. Sebaliknya, semakin rendah ukuran pemerintah daerah, maka semakin rendah pula kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil signifikan menunjukkan bahwa hasil penelitian ini dapat digeneralisasikan ke dalam seluruh populasi.
6. Ukuran legislatif berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar jumlah anggota legislatif, maka semakin baik kinerja keuangan pemerintah daerah. Sebaliknya, semakin kecil ukuran legislatif maka semakin rendah pula kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil yang tidak signifikan menunjukkan bahwa hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan ke dalam seluruh populasi.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, berikut beberapa saran yang dapat disampaikan oleh peneliti :

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Maka untuk meningkatkan kemandirian fiskal dan kualitas pengelolaan keuangan, disarankan agar pemerintah daerah tidak terlalu bergantung pada dana transfer dari pusat. Pemerintah daerah perlu menggali potensi sumber pendapatan asli daerah secara lebih inovatif, misalnya melalui optimalisasi pajak dan retribusi daerah, pengelolaan aset, serta

pengembangan layanan publik berbasis ekonomi lokal yang berkelanjutan.

2. Belanja daerah juga ditemukan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Oleh karena itu, disarankan agar alokasi belanja dilakukan secara lebih selektif dan efisien, terutama dengan memprioritaskan program-program yang memiliki dampak langsung terhadap peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Setiap belanja yang direncanakan perlu dievaluasi secara berkala agar tidak hanya terserap dalam angka, tetapi betul-betul memberikan kontribusi terhadap hasil yang terukur dalam pengelolaan keuangan.
3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SILPA berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Maka untuk memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan, pemerintah daerah disarankan untuk menyusun perencanaan anggaran yang lebih realistis dan terukur. Pelaksanaan anggaran juga perlu dipercepat, khususnya pada program-program strategis, agar tidak terjadi akumulasi dana yang tidak terserap secara optimal. Evaluasi rutin terhadap hambatan serapan anggaran juga diperlukan guna meningkatkan efektivitas penggunaan dana publik.
4. Opini audit terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Maka untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan diawasi melalui sistem pengendalian intern yang memadai. Penguatan kapasitas SDM pengelola keuangan serta pemanfaatan teknologi informasi juga dapat menjadi strategi dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan daerah.
5. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah yang diukur dari total aset berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Maka pemerintah daerah disarankan untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset tetap yang dimiliki, baik berupa

tanah, bangunan, maupun fasilitas penunjang lainnya. Pemerintah daerah perlu melakukan inventarisasi dan penilaian ulang terhadap seluruh aset, untuk memastikan bahwa aset tersebut produktif sehingga dapat dimanfaatkan untuk mendukung program aktif yang berhubungan dengan peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah.

6. Ukuran legislatif memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan jumlah anggota legislatif tidak secara langsung berkontribusi terhadap perbaikan kinerja keuangan daerah secara menyeluruh. Oleh karena itu, ukuran legislatif tidak perlu dijadikan sebagai fokus utama dalam upaya optimalisasi kinerja keuangan pemerintah daerah. Sebagai alternatif, pemerintah daerah disarankan untuk lebih menitikberatkan pada peningkatan kualitas kinerja lembaga legislatif, khususnya dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran secara efektif.
7. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain yang berpotensi memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah, seperti kualitas sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, atau tingkat efisiensi anggaran, agar hasil penelitian lebih komprehensif. Selain itu, indikator kinerja keuangan juga dapat diperluas tidak hanya dari aspek kemandirian, tetapi juga mencakup efektivitas dan efisiensi anggaran. Serta menambah rentang waktu pengamatan yang lebih panjang dan fokus pada jangkauan wilayah yang lebih luas.